

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PEMERINTAH
ENREKANG**

**FUJI NURABILA
105730485814**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (LKPD) PEMERINTAH ENREKANG**

OLEH

FUJI NURABILA

NIM 105730485814

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDY AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua tercinta, selaku motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendoa; akanku dan juga adik – adikku yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Dosen-dosenku, Terkhusus kedua pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepadaku.
3. Para sahabat dan teman –teman sekalian yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Aku belajar, aku berjuang dan aku berdoa hingga aku berhasil. Tarima kasih semua.

MOTTO HIDUP

Kesuksesan akan anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi masalah, tantangan dan hambatan secara mandiri, jangan takut untuk melangkah tapi takutlah ketika anda berdiam ditempat
“maka sesungguhnya bersama kesulitan itu, ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 5)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Enrekang
Nama Mahasiswa : Fuji Nurabila
No Stambuk/NIM : 105730485814
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.

Makassar, 27 Oktober 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. H. Ansyarif Khalid, SE.M.Si.Ak.CA
NIDN: 0916096601

Pembimbing II,

Chairul Hichsan, SE.M.Ak
NBM: 1286844

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasufong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,
program studi Akuntansi

Ismail Badottan, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Fuji Nurabila**, NIM : **105730485814**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 198/SK-Y/62201/091004/2018, Tahun 1438 H/2018 M, Tanggal 18 Safar 1440 H/ 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Safar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
2. Ismail Rasulong, SE., MM
3. Andi Arman, SE., M.Si, Ak.CA
4. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si, Ak.CA 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuji Nurabila
Stambuk : 105730485814
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Enrekang."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, November 2018

mbuat Pernyataan,



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badottahi, SE., Msi., Ak.CA.CSP
NBM : 1073428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Enrekang”**. dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerjas keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini berkat bantuan dari orang –orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Diaman Massa dan ibu Masita Museng yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih, dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan., dan doa restu yang telah diberikan demi

keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdullah Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahing, SE, M.Si, Ak.CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Chairul Ichsan, SE.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan. Masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman yang penulis miliki oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Khususnya pada lingkungan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhir kata, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Aamiin.
Billahi fii Sabilil Haq, Fastabikul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

Fuji, Nurabila. (2018) "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Enrekang" Skripsi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ansyarif Khalid dan pembimbing II Chairul Ihsan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah yang diprosikan melalui Kekayaan Pemeritah Daerah dan Jumlah SKPD apakah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif Kuantitatif. Data yang diolah adalah data yang diperoleh dari Badan Pengelolah Keuangan Daerah tahun 2011 sampai 2017.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kemudian Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Jumlah SKPD terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).**Kata Kunci** : *Karakteristik Pemerintah Daerah, Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD, Kekayaan Daerah, Jumlah SKPD.*

ABSTRACT

Fuji, Nurabila. (2018) "The Influence of Regional Government Characteristics on Enrekang Government Local Government Financial Statements (LKPD) Compulsory Disclosure Levels" Thesis in Accounting Studies, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Ansyarif Khalid and mentor II Chairul Ichsan.

This study aims to determine the influence of local government characteristics proxied through the regional government wealth and the number of SKPD whether it affects the level of mandatory disclosure of local government financial statements (LKPD) on the Government of Enrekang. The type of research used in this study is a case study with a quantitative descriptive approach. The processed data is data obtained from the Regional Financial Management Agency in 2011 to 2017. Based on the results of data processing it Regional wealth does not significantly influence the level of mandatory disclosure of local government financial statements, then the second findings in this study stated that the number of SKPDs has a signifikan influence on the level of mandatory disclosure of local government financial statements.

Keywords: Characteristics of Local Government, Level of Mandatory Disclosure of LKPD, Regional Wealth, Number of SKPD.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Standar Akuntansi Pemerintah	8
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	11
3. Pengungkapan LKPD dalam CaLK	13
4. Karakteristik Pemerintah	16
B. Tinjauan Empiris	20
C. Kerangka Konsep	23
D. Hepotesis	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
C. Defenisi Operasional Variabel Dan pengukuran	27
D. Populasi Dan Sampel	30
E. Tehnik Pengumpulan Data	30
F. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian	35
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat BPKD Kabupaten Enrekang.....	35
2. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Enrekang	36
3. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang.....	40
BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan	49
A. Hasil Dari Penelitian	49
1. Statistik Data	49
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	56
3. Pengujian Hipotesis	61
B. Pembahasan	62
1. Karakteristik LKPD.....	62
2. Kebijakan Akuntansi	64
3. Pengaruh Karakteristik LKPD.....	64
4. Manfaat Kebijakan Pengungkapan LKPD	65
BAB VI PENUTUP	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	21
Tabel 4.1	PAD Pemda Kab. Enrekang.....	51
Tabel 4.2	Jumlah SKPD Pemda Kab. Enrekang	53
Tabel 4.3	Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Kab. Enrekang.....	54
Tabel 4.4	Deskriptif Sampel Penelitian.....	55
Tabel 4.5	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.7	Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Hipotesis.....	61
Tabel 4.10	Hasil Parsial	61

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Gambar 2.3	Kerangka Konsep.....	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	40
Gambar 4.2	Uji Normalitas.....	57
Gambar 4.3	Heterokedastisitas.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintah yang bersih Sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat,. Salah satu upaya kongkrit yang dilakukan adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Standar akuntansi sangat penting diperlukan sebagai pedoman dan petunjuk dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini juga dipertegas dari pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga komponen yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan undang-undangan (statutory report).

Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 24 menyatakan bahwa entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Begitu pula dalam paragraf-paragraf selanjutnya yang menjelaskan pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna, sebab hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian, adanya pemenuhan atas pengungkapan akan berguna dan memudahkan pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance merupakan hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan dan akuntabilitas administrasi publik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan seperangkat prosedur atau proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintahan untuk menciptakan harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mengubah sistem pelaksanaan pemerintah daerah, urusan pemerintah yang sebelumnya sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat kini sebagian besar urusan rumah tangga pemerintah ditangani oleh pemerintah daerah.

Dewasa ini, praktik akuntansi sektor publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian dibanding masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk

dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga–lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009:1).

Upaya konkrit mewujudkan good governance, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

UU No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan

merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, wajib membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil laporan keuangan pemerintah yang telah dibuat nantinya harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, baru kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP). Laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maka laporan keuangan yang diaudit harus dilampiri dengan pengungkapan. Pengungkapan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan

pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure) (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Penelitian ini menarik dilakukan karena masih jarang nya penelitian mengenai topik pengungkapan laporan keuangan di sektor pemerintah akibat terbatasnya informasi dan data dari pemerintah yang sulit diakses publik, dan cenderung rahasia. Selain itu, motif yang mendasari pengungkapan cenderung *sulit* untuk dikembangkan, sehingga dalam penelitian ini nantinya akan lebih mengukur ketaatan dibanding pengungkapannya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengambil judul: **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang dibuat yaitu :

1. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada pemerintah enrekang?
2. Apakah jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada pemerintah enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintah Enrekang.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintah Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan diharapkan dipakai sebagai wawasan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan memberikan informasi serta sumbangan studi empiris untuk peneliti selanjutnya yang membahas mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat Pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai Masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada termasuk para pendidik yang ada didalamnya. Dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah secara umum.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

memacu dan mendorong peneliti selanjutnya, untuk meneliti lebih banyak terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (Cash towards Accrual). PP ini merupakan transisi sebab Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara mengamanatkan perlunya pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Sedangkan standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut ialah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan

akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.
- b. Laporan perubahan saldo anggaran menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Laporan operasional(LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

- d. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- e. Neraca merupakan suatu daftargambaran posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca meliputi sekurang-kurangnya pos-pos seperti, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.
- f. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual.
- g. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara (seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertugas menyusun LKPD. Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LKPD disajikan harus melampirkan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Selanjutnya LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2004) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Sementara Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sedangkan Laporan Aliran/Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah periode tertentu. Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dan informasi lain yang diharuskan dan diajarkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan secara wajar. Laporan Keuangan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Pengungkapan LKPD dalam CaLK

Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2000 dalam Khasanah, 2014)

Dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban

keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2010 Lampiran I, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sedangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan.

4. Karakteristik Pemerintah

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Penelitian ini karakteristik pemerintah daerah di proksikan melalui dua variabel yaitu:

a. Kekayaan Daerah

Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut. Kekayaan Pemda menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan dari suatu daerah dimana pengelolaaannya diurus sendiri oleh rumah tangga/pemerintah daerah itu sendiri. Jenis penerimaan ini terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah. Dengan demikian, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga Pemda akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel.

Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah. Dengan demikian, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga Pemda akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel.

b. Jumlah SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang. Oleh karena itu, keberadaan SKPD dalam suatu daerah, gagasan-gagasan, informasi, dan inovasi yang lebih banyak akan memunculkan suatu pengungkapan. Sebagai konsekuensinya, akan terdapat beberapa tekanan untuk mengungkapkan sesuai dengan SAP (Suhardjanto, dkk, 2010).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan anggaran atau pengguna barang. Sejak tahun 2004 untuk membentuk SKPD berdasarkan UU no. 32 Pasal 120 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk kedalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah.

Beberapa bagian yang termasuk dalam SKPD yaitu, Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, dinas-dinas, badan-badan, inspektorat daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, kecamatan kecamatan atau satuan lainnya yang setingkat, dan kelurahan / desa atau satuan lainnya yang setingkat.

Peneliti mencoba menggunakan jumlah SKPD sebagai salah satu proksi untuk menjelaskan kompleksitas. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut melakukan kegiatannya. Semakin besar SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Daftar Nama Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
1.	Febriyanti syafitri, dkk (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	Statistik deskriptif, uji korelasi dan uji regresi	Menemukan bahwa dari 8 (Delapan) variabel yang diuji, hanya 4 variabel independen yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu ukuran legislative, umur administratif pemda, kekayaan pemda, dan intergovernmental revenue

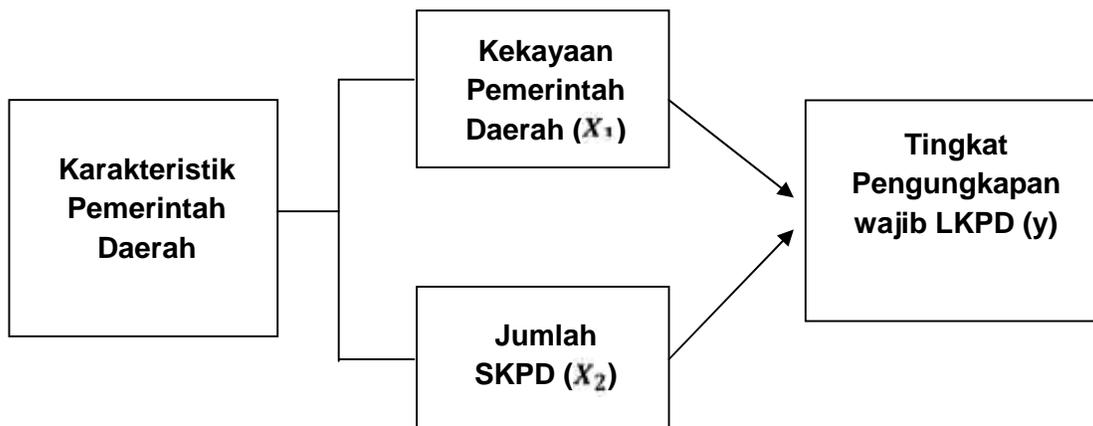
2	Ayu Dewi Ratnasari (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BpkRi Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2014)	Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan pengujian hipotesis	Ada dua variabel karakteristik daerah, yaitu ukuran pemerintah daerah dan intergovernmental revenue yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Provinsi. Sedangkan dua variabel lainnya, yaitu kekayaan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh.
3.	Eka Ardhani Sisdyani (2013)	Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..	Analisis regresi linier berganda, dan uji <i>kolmogorov-sminarnov</i> ,	1. Simpulan penelitian ini yaitu kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. 2. Kemakmuran dengan aset dan kekayaan yang besar tentu lebih memiliki tekanan yang lebih besar dari masyarakat.
4.	Candra Maulana (2009)	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd).	Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi	Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran pemda dan jumlah legislatif terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD
5.	Putu Riesty Masdiantini, dkk (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit Bpk	.Analisis faktor, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis	Rata-rata pemerintah kabupaten/kota di Bali masih menunjukkan kinerja keuangan yang kurang mandiri dan kurang efisien maka diharapkan

		Pada Kinerja Keuangan.	is regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis	pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja keuangan daerah
6.	Hafidh Susila Sudarsana, dkk (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).	model analisis regresi logistik ordinal atau PLUM (<i>Polytomous Universal Model</i>)	Hasil penelitian bahwa total aset, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
7.	Shiddiq Nur Rahardjo dan Nur Lailatul Khasanah(2013)	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Uji analisis statistik t (test)	Pada penelitian ini dari Tujuh variabel yang diuji, hanya total asset, jumlah SKPD yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD sedangkan variabel yang lain tidak.
8.	Lulus Kurniasih, dkk (2011)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Deskripsi Statistik dan Pengujian Hipotesis	Ukuran pemerintah daerah; tingkat kekayaan daerah; dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.
9.	Kadek Aris Dwi Pratama (2015)	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan	Statistik deskriptif dan Uji multikolinearitas.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah

		Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013).		daerah. n keuangan pemerintah daerah. Hal ini menginteprtasikan bahwa kompleksitas pemerintah daerah yang di proksikan dengan jumlah penduduk di setiap daerah.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan kekayaan Pemerintah Daerah dan Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, yang telah dijelaskan sebelumnya maka disusun tentang kerangka konsep seperti yang didiskripsikan pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka konsep

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan hasil rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kekayaan Pemerintah Daerah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga 2011). Kekayaan Pemerintah Daerah diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu 2005).

Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

2. Pengaruh Jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan pemerintah Daerah. Semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki semakin kompleks pemerintahan tersebut, sehingga semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan (Hilmi 2011). Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat pengungkapan Wajib Laporan Keuangan LKPD.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini. penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka (syamsudin & Damiyanti: 2011). yang berupa data-data dokumen yang berhubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Pinang, kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 917111. Penelitian dilaksanakan dari bulan April 2018 sampai dengan juni 2018. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (LKPD). Dalam hal ini populasi dan sampel yang digunakan untuk mendukung teknik pengukuran variabel.

C. Definisi Operasional Varibel dan Pengukuran

Ada 2 variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kekayaan Daerah, dan Jumlah SKPD. Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (LKPD). Berikut penjelasan mengenai definisi operasional variabel masing-masing.

1. Kekayaan Daerah (X_1)

Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut. Kekayaan Pemda menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang.

PAD digunakan karena perannya, yang walaupun kontribusinya tidak terlalu besar terhadap total kekayaan pemerintah daerah secara keseluruhan, namun PAD merupakan satu-satunya sumber yang keuangan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri dan merupakan potensi pendapatan asli daerah.

KEKAYAAN DAERAH = PAD

2. Jumlah SKPD (X_2)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2012, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SKPD merupakan entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Jumlah satuan kerja perangkat daerah didapatkan dari catatan atas laporan keuangan.

SKPD = Jumlah SKPD

3. Tingkat Pengungkapan LKPD

Tingkat pengungkapan LKPD yang dimaksud ialah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD Pemerintah Daerah dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tingkat pengungkapan LKPD ini akan menggambarkan seberapa besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibanding dengan pengungkapan wajib yang seharusnya disajikan dalam CaLK menurut SAP. Penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus:

DISC = $\frac{\text{Pengungkapan Dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$

Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti yaitu data Calk dari tahun 2011 sampai 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam meneliti tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Studi pustaka, yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang diperoleh dari dokumen, buku, artikel serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

F. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

1. Analisis deskriptif

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dan perkembangan secara kuantitatif baik variabel dependen maupun variabel independen, dengan menggunakan dasar angka tahun yaitu selama tujuh periode dari tahun 2011-2017.

2. Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kekayaan daerah (X_1) dan jumlah SKPD (X_2) sedangkan variabel independen adalah Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD (Y).

Bila diterapkan ke dalam model penelitian ini, nampak sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$	= Koefisien regresi
X_1	= Kekayaan Daerah
X_2	= jumlah SKPD
e	= Error atau sisa (Residual)

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji f. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dilakukan, harus terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik. Pengujian dilakukan untuk memperoleh parameter yang valid dan handal. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1) Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dideteksi pada model regresi apabila pada variabel terdapat pasangan variabel bebas yang saling berkorelasi kuat satu sama lain. Dengan adanya multikolinearitas maka kesalahan untuk masing-masing koefisien yang diduga akan sangat besar. Akibatnya nilai t akan menjadi terendah. Akibat lainnya adalah bahwa pengaruh masing-masing variabel bebas tidak dapat dideteksi. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas perlu dilakukan analisis koefisien korelasi diantara variabel bebasnya, misalnya antara X_1 dan X_2 . Kalau muncul koefisien korelasi yang tinggi, maka dapat diperkirakan akan terjadi multikolinearitas bila X_1 dan X_2 tersebut digunakan secara bersama-sama.

3) Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Autokolerasi

Adanya autokolerasi dalam model regresi berarti adanya kolerasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Regresi yang terdeteksi autokolerasi dapat berakibat pada biasanya interval kepercayaan dan ketidaktepatan penerapan uji F dan uji t. Autokolerasi dapat dicegah melalui pendekatan terhadap statistik Durbin-Waston. Apabila nilai DW ini menghasilkan nilai tidak mendekati dua (2) maka dapat dipastikan terjadi autokolerasi, namun bila nilai DW mendekati angka dua (2), maka dapat tidak dipastikan terjadi autokolerasi pada hitungan regresi tersebut.

b. Pengujian Hipotesis

Adapun metode analisi yang akan digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang telah dikemukakan dan untuk membuktikan validitas hipotesis adalah sebagai berikut:

1) Uji t atau Uji Parsial

Uji t dimaksudkan untuk menguji signifikan pengaruh masing-masing variabel independen (X_i) secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

Adapun formulasi uji t adalah :

$$\text{Uji t} = \frac{bt}{S_{bt}}$$

Keterangan :

t = Dari daftar tabel distribusi

b = Parameter estimasi dari X_1

Sb = Standar error dari X_1

Apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$) maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$), maka variabel independen secara parsial

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BPKD Kabupaten Enrekang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Cikal bakal keberadaannya dari BPKD Kabupaten Enrekang yang sebelumnya menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2004 adalah merupakan hasil penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2007 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan berlaku Peraturan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD yang sudah ada ditambahkan tugas baru yaitu Bidang Pengelolaan Asset Daerah yang sebelumnya adalah Bagian

Perlengkapan pada Sekretariat Daerah sehingga dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan berubah nama menjadi Dinas Pengelola Keuangandan Asset Daerah atau yang disingkat dengan DPKAD sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada Tahun 2016 Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan berlaku Peraturan Pemerintah tersebut maka dilakukan penataan dan peninjauan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Dinas Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipecah dan dimekarkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Bidang Penerimaan DPKAD menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Bidang Asset dikembalikan menjadi Bagian Asset pada Sekretariat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Visi Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

a) Visi

Untuk Mengantisipasi tantangan dan perkembangan kedepan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah daerah Kabupaten

Enrekang perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan kearah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tujuan masyarakat akan pelayanan prima sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan, perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan atau manfaat.

Visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan”

b) Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan, oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Enrekang secara khusus dan penyelenggaraan negara secara umum. Misi sesuai dengan tugas pokok dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan

sesuai perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi, oleh karena itu misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah:

“Mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib serta meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah”

3. Struktur Organisasi Badan Pengelolan Keuangan Daerah (BPKD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan tata kerja BPKD Kabupaten Enrekang maka struktur Organoisasi BPKD Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

b. Sekretariat :

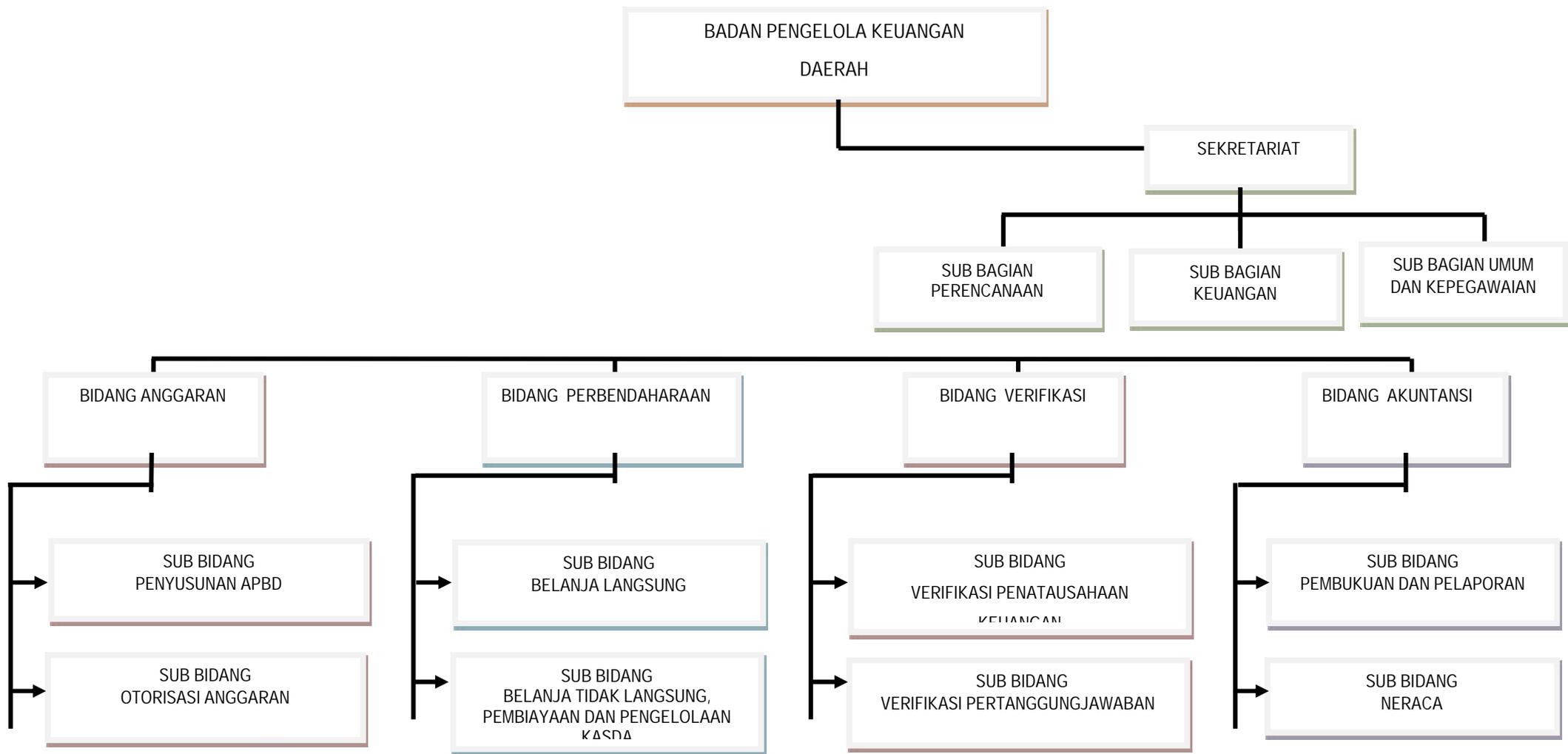
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program;

c. Bidang Anggaran, Membawahkan :

1. Sub Bidang Penyunan Anggaran;
2. Sub Bidang Otoritasi Anggaran;

d. Bidang Perbendaharaan, Membawahkan :

1. Sub Bidang Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
- e. Bidang Verifikasi, Membawahkan :
1. Sub Bidang Verifikasi Penata usahaan Keuangan;
 2. Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban;
- f. Bidang Akuntansi Membawahkan;
1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Neraca;



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD Kab. Enrekang

4. Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

1) Badan Pengelola Keuangan Daerah Dipimpin Oleh seorang kepala Daerah yang Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Keuangan Daerah lingkup Anggaran, Perbendaharaan, verifikasi dan Akuntansi. Adapun uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan petunjuk kepada sekretaris dan kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan agar tugas – tugas dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinir kegiatan sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. Menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, konsep naskah dinas, surat tugas , surat perintah perjalanan dinas, Surat Undangan, nota dinas, lembar disposisi, dan daftar hadir serta surat-surat lainnya.

2) Sekretariat Dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan dan mempunyai tugas membantu kepala Binas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan daerah. Adapun uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
 - b. penyusun dan menetapkan Rencana Anggaran satuan Kerja Sekretariat;
 - c. Mengkoordinasi Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan kepala Badan serta para Kepala Bidang Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Membina dan Mengkoordinasi unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
- 3) Sub Bagian Perencanaan Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program / kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Adapun uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub, Bagian Perencanaan;
 - c. Mengkoordinasi rancangan rencana sekretaris dan rancangan rencana Anggaran Satuan kerja Sub Bagian serta Dokumen penetapan kinerja Bagian dengan sekretariat Dinas, Kepala Sub bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian.
- 4) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Badan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan Merumuskan rancangan rencana strategis Sub Bagian Keuangan;
 - b. Menyiapkan dan meremuskan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - c. Mengkoordinasi Rencana strategis dan Rencana Anggaran Sub Bagian Keuangan Dengan Sekretaris Badan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sb Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
- a. Menyiapkan Dan Merumuskan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Menyiapkan Bahan Koordinasi dalam melaksanakan tugas Badan dan memberikan pelayanan Administrative dan Fungsional kepada unsure dilingkup Badan;
 - c. Menghimpun, Mengolah, Menggandakan dan Menyimpan dokumen laporan secara rapih ;
- 6) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala Bidang, mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan sebagian tugas BPKD Lingkup Penyusunan Anggaran dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan Penyusunan APBD,

perubahan APBD, Nota Pengantar APBD, Nota Pengantar Perubahan APBD, DAN Otorisasi Anggaran. Kepala Bidang Anggaran Mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Penyusunan Rencana, Program, dan kegiatan bidang Anggaran;
- b. Penyusunan Bahan Petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung dan Pembiayaan;
- c. Pengkoordinasian Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD

7) Sub Bidang Penyusunan APBD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Penyiapan Rencana, Program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan APBD;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis Lingkup Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD
- c. Penyusunan laporan kinerja program bidang Anggaran Lingkup Penyusunan APBD;
- d. Pelaksanaan Monitoring evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan tugas;

8) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang beradlah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup

pembebanan belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Bidang Perbendaharaan;
 - c. Melaksanakan fungsi kegiatan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kas Daerah secara Periodik;
- 9) Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup Belanja Langsung. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Penyiapan Rencana, Program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Belanja Langsung;
 - c. Menyiapkan Bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Sub Bidang Belanja Langsung;
 - d. Penyiapan Register Penolakan Surat Perintah membayar (SPM) Belanja Langsung;
- 10) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan Lingkup Belanja Tidak Langsung Pembiayaan dan Pengelolaan Kas. Kepala Sub Bidang Pembiayaan Tidak langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas;
- b. Penyusunan Bahan Petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas;
- c. Penyiapan Bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan kas;
- d. Menyiapkan Bahan Pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD

11) Bidang Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup BPKD di Bidang Verifikasi. Kepala Bidang Verifikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan Kegiatan Bidang Verifikasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Bidang Verifikasi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Verifikasi;
- d. Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja tidak langsung, dan pengeluaran Pembiayaan;

12) Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh oleh seorang Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada kepala Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang Verifikasi Lingkup Penatausahaan Keuangan. Kepala Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan Rencana, Program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan;
- b. Penyusunan Bahan petunjuk Teknis lingkup Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan;
- c. Menyiapkan Bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan;
- d. Melaksanakan Monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

13) Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Virifikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang Verifikasi lingkup Verifikasi pertanggungjawaban. Kepala Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan Rencana, Program Kegiatan Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Verifikasi Pertanggungjawaban;
- c. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban lembaga penerima Bnuan Hbah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- d. Melakukan Evaluasi Laporan Realisasi Belanja SKPD

14) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup Akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Bidang Akuntansi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi
- d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi pemerintah daerah;
- e. Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

15) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan Sebagian tugas Bidang Akuntansi lingkup pembukuan dan Pelaporan. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembukuan dan pelaporan;
- c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan dan pelaporan;

16) Sub Bidang Neraca dipimpin oleh seorang kepala sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Akuntansi

mempunyai tugas pokok bantu kepala bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan pelaporan lingkup penyusunan Neraca. Dalam menjalankan fungsi Kepala sub Bidang Neraca mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub bidang Neraca;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup neraca;
- c. Penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;

B. HASIL PENELITIAN

1. Statistic Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar Deviasi (Standard Deviation). Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan melalui kekayaan pemerintah daerah dan jumlah SKPD, sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Catatan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pemerintah Enrekang menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas. Teknik pengumpulan data telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sampel penelitian ini

adalah data CaLK dari tahun 2011 sampai 2017. Adapun data penelitian sebagai berikut:

a. Kekayaan Daerah

Dalam menentukan kekayaan daerah didasarkan dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah digunakan karena perannya, yang walaupun kontribusinya tidak terlalu besar terhadap total kekayaan pemerintah daerah secara keseluruhan, namun PAD merupakan satu-satunya sumber yang keuangan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri dan merupakan potensi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun pendapatan asli daerah berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1

PAD Pemda Keb. Enrekang

Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016

No	Tahun	PAD Pemda Keb. Enrekang
1	2011	14.785.215.849

2	2012	17.920.619.304
3	2013	21.176.935.131
4	2014	32.455.873.455
5	2015	49.214.800.279
6	2016	56.383.446.988

Sumber Data: CaLK Pemda Keb. Enrekang

Berdasarkan dari tabel 4.1 dapat diuraikan PAD Pemda Keb. Enrekang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang pada TA 2011 sebesar 14.785.215.849 dan pada TA 2012 mengalami kenaikan sebesar 17.920.619.304.
- b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang pada TA 2012 sebesar 17.920.619.304 dan pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 21.176.935.131.
- c. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerinta Kabupaten Enrekang pada TA 2013 sebesar 21.176.935.131 dan pada TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 32.455.873.455.
- d. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerinta Kabupaten Enrekang pada TA 2014 sebesar 32.455.873.455 dan pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 49.214.800.279.

- e. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerinta Kabupaten Enrekang pada TA 2015 sebesar 49.214.800.279 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 56.383.446.988.
- f. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerinta Kabupaten Enrekang pada TA 2016 sebesar 56.383.446.988.

b. Jumlah SKPD

Berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SKPD merupakan entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Jumlah satuan kerja perangkat daerah didapatkan dari catatan atas laporan keuangan. Adapun Jumlah SKPD berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah SKPD Pemda Keb. Enrekang
Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016

No	Tahun	Jumlah SKPD Pemda Keb. Enrekang
1	2011	26
2	2012	26
3	2013	26
4	2014	26
5	2015	26

6	2016	43
---	------	----

Sumber Data: CaLK Pemda Keb. Enrekang

Berdasarkan dari tabel 4.2 dapat diuraikan Jumlah SKPD Pemda Kabupaten Enrekang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Jumlah SKPD Pemda Kabupaten Enrekang TA 2011 sebesar 26 dan Jumlah SKPD Pemda Kabupaten Enrekang tidak mengalami perubahan sampai TA 2015.
- b. Pada TA 2016 Jumlah SKPD Pemda Kabupaten Enrekang sebesar 43 dan mengalami perubahan dari tahun TA 2015

c. Tingkat Pengungkapan LKPD

Dalam mengukur tingkat pengungkapan, penelitian ini menggunakan sistem scoring. Sistem scoring merupakan sistem pemberian skor dengan membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan SAP. Adapun Tingkat Pengungkapan LKPD berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

**Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Keb. Enrekang
Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016**

No	Tahun	Tingkat Pengungkapan LKPD
1	2011	37%
2	2012	31%
3	2014	48%
4	2015	42%

5	2016	51%
6	2017	58%

Sumber Data: CaLK Pemda Keb. Enrekang

Berdasarkan dari tabel 4.3 dapat diuraikan Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Keb. Enrekang tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Kabupaten Enrekang pada TA 2011 sebesar 37% dan pada TA 2012 mengalami penurunan sebesar 31%.
- b. Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Kabupaten Enrekang pada TA 2012 sebesar 31% dan pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 48%.
- c. Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Kabupaten Enrekang pada TA 2013 sebesar 48% dan pada TA 2014 mengalami penurunan sebesar 42%.
- d. Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Kabupaten Enrekang pada TA 2014 sebesar 42% dan pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 51%.
- e. Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Kabupaten Enrekang pada TA 2015 sebesar 51%.

d. Komponen Deskriptif Sampel Penelitian

Dari hasil penghitungan komponen belanja modal, komponen pendapat asli daerah dan komponen kinerja keuangan, maka dapat diketahui Deskriptif Sampel penelitian yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskriptif Sampel penelitian

No	Tabel	Variabel		
		PAD	SKPD	LKPD
1	2011	14.785.215.849	26	37%
2	2012	17.920.619.304	26	31%
3	2014	21.176.935.131	26	48%
4	2015	32.455.873.455	26	42%
5	2016	49.214.800.279	26	51%
6	2017	56.383.446.988	43	58%

Sumber Data: CaLK Pemda Keb. Enrekang

Adapun Analisis data penelitian yang dilakukan, melakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan analisis data seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, mean, dan standard deviation dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis statistic deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation

PAD	6	1.48E10	5.64E10	3.1989E10	1.73368E10
SKPD	6	26.00	43.00	28.8333	6.94022
DISC	6	31.00	58.00	44.5000	9.81326
Valid N (listwise)	6				

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh Nilai rata-rata (mean) dari PAD perintah daerah Kabupaten Enrekang adalah Rp 3.1989E10 dengan standar deviasi sebesar 1.73368E10. Nilai terendah dari PAD adalah Rp 1.48E10 pada tahun 2011 sedangkan nilai (maksimum) dari PAD adalah Rp 5.64E10 tahun 2016.

Nilai rata-rata (mean) dari Jumlah SKPD Pemda Kabupaten Enrekang adalah 28.8333 dengan standar deviasi sebesar 6.94022. Nilai terendah (minimum) dari Jumlah SKPD adalah 26 pada tahun 2011. Sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Jumlah SKPD adalah 43 pada tahun 2016.

Nilai rata-rata (mean) dari Tingkat Pengungkapan LKPD Pemda Kabupaten Enrekang adalah 44.5000 persen sedangkan standar deviasi sebesar 9.81326. Nilai terendah (minimum) dari kinerja keuangan adalah 31 persen pada tahun 2012 sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari tingkat pengungkapan adalah 58 persen pada tahun 2016.

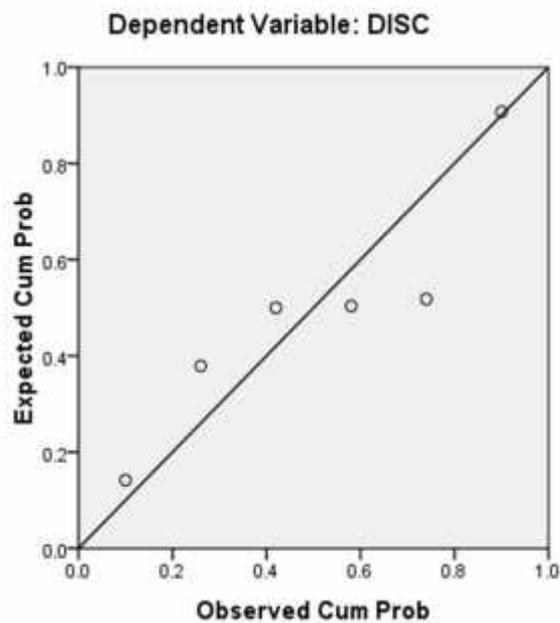
2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas maka akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas menggunakan normal probability plot, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai $p > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel

probability plot yang diteliti terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar IV.2 Uji Normalitas

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Dari normal probability plot di atas dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar sekitar garis diagonal atau mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menguji nilai residual dengan Kolmogorov-Smirnov. Untuk menguji distribusi residual normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabal 4.6
HASIL UJI NORMALITAS (K-S TEST)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

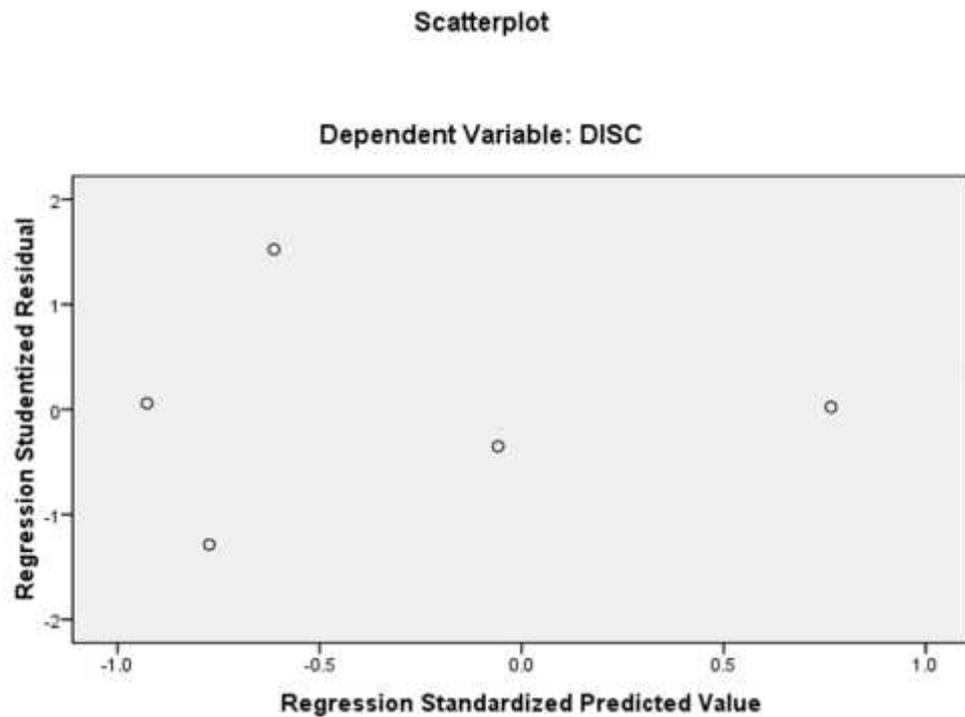
		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.05996420
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.310
	Positive	.310
	Negative	-.179
Kolmogorov-Smirnov Z		.760
Asymp. Sig. (2-tailed)		.611

Sumber data : Hasil Olahan data (2018)

Tabel 4.6 menunjukkan Nilai K-S sebesar 0,760 (sig 0,611) untuk semua variabel tersebut diatas 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel belanja modal, pendapatan daerah, kinerja keuangan secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat melalui grafik scatterplot deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar 4.3 dibawah ini:



Gambar 4.3 : Heterokedastisitas

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Pada gambar 4.3 jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat di simpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau HO di terima yang berarti model regresi ini layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 4.7
UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.525	1.905
	SKPD	.525	1.905

a. Dependent Variable: DISC

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat di simpulkan bahwa nilai Tolerance semua variabel lebih besar 0,05 (>5%) serta nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 (VIF<10). Maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

d. Hasil Uji Autokolerasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin-Watson, terlihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
UJI AUTOKOLERASI

Model	Durbin-watson
1	1.252

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat di simpulkan bahwa nilai DW mendekati angka dua (2), maka dapa dikatakan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat Autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu.

3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda ini menggunakan program SPSS yang sudah tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.324	13.088		5.859	.004
	PAD	-2.134	1.667	-.630	-1.777	.174
	SKPD	2.241	2.581	.471	3.415	.001

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Dari hasil analisis data di atas, maka hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = + 1X_1 + 2X_2 + e$$

$$Y = 24.324 + -2.134 X_1 + 2.241 X_2 + e$$

Uji t (Parsial)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disajikan uji t atas variabel independen (PAD dan SKPD) terhadap variabel dependen (LKPD) sebagai berikut:

1) Kekayaan Daerah X1

Berdasarkan tabel diatas, variabel PAD memiliki nilai $0,174 > 0,05$ atau tidak signifikan, karena nilai signifikan uji t lebih besar dari batas nilai signifikan ($= 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

2) Jumlah SKPD

Berdasarkan tabel diatas, variabel SKPD memiliki nilai $0,01 > 0,05$ atau signifikan, karena nilai signifikan uji t dibawah dari batas nilai signifikan ($= 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa SKPD berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh karakteristik LKPD

Berikut pengaruh Karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan melalui Kekayaan daerah dan jumlah SKPD:

a. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Kekayaan Daerah signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai t sebesar -1.777 dengan signifikan sebesar $.004$ (lebih besar dari $= 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Kekayaan Daerah turun, maka tingkat pengungkapan LKPD menurun,

dan sebaliknya jika kekayaan daerah semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu dengan hasil pengujian ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.

Penelitian yang dilakukan oleh setyaning syafitri (2012) menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan keuangan pemerintah daerah LPKD, akan tetapi, bertolak belakang dengan hasil penelitian setyowati (2016) dan pratama dkk. (2015)

- b. Pengaruh Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Tingkat Pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) . Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai t sebesar 3.415 dengan signifikan sebesar .001 (di bawah dari $\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis kedua (H2) diterima jadi dapat disimpulkan bahwa jika jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut, sehingga semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh patrick (2007) menemukan bahwa pemerintah daerah di pennsylvania dengan tingkat deferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi GASB 34 dibandingkan dengan tingkat

deferensiasi fungsionalnya rendah, sedangkan penelitian Hilmi (2011) tidak menemukan pengaruh antara jumlah SKPD dengan tingkat pengungkapan LKPD

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan dan hasil operasi sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Tujuan kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan.
- b. Dapat diandalkan dengan pengertian yang mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan organisasi, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumannya, netral yaitu bebas dari berpihak, mencerminkan kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material.

3. Manfaat kebijakan pengungkapan LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (LKPD). Berikut Manfaat kebijakan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi kepentingan perusahaan adalah dapat diperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya resiko informasi bagi investor dan kreditur. Dengan demikian investor dan kreditur bersedia membeli sekuritas dengan harga tinggi akibat tersebut biaya modal perusahaan menjadirendah.
- b. Bagi investor pengungkapan bermanfaat untuk mengurangi resiko informasi berupa pengungkapan kesalahan pembuatan keputusan investasi. Sehingga investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap. Akibatnya sekuritas perusahaan menjadi lebih menarik bagi banyak investor dan harganya akan naik.
- c. Bagi kepentingan Nasional yaitu berupa adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor. Dengan diperolehnya biaya modal yang lebih rendah oleh perusahaan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja meluas dan pada akhirnya standar kehidupan secara nasional akan meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

penelitian ini dilakukan untuk menguji Karakteristik Pemerintah Daerah yang diprosikan melalui Kekayaan Daerah dan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil dari pengujian pertama menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah (PAD) memiliki nilai $0,174 > 0,05$ atau tidak signifikan, karena nilai signifikan uji t lebih besar dari batas nilai signifikan ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
2. Hasil dari pengujian kedua menunjukkan bahwa variabel jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki nilai $0,01 > 0,05$ atau signifikan, karena nilai signifikan uji t dibawah dari batas nilai signifikan ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa SKPD berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum tahun 2016, diharapkan dapat meneliti tingkat pengungkapan wajib LKPD yang telah benar-benar menerapkan basis akrual saja berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sehingga penilaian terhadap tingkat pengungkapannya lebih adil.
2. Penelitian sebelumnya diharapkan menambah variable Karakteristik Pemerintah Daerah yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun berikutnya sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan hasil yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Dewi Ratnasari. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Ri Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2014).
- Candra Maulana. (2009). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd).
- Dyah Setyaningrum, (2010). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal akuntansi dan keuanga indonesia*. Vol.3.
- Eka Ardhani Sisdyani. (2013). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Febriyani Syafitri. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan keuangan Indonesia*. Vol.9
- Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hafidh Susila Sudarsana. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.2.
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Hilmi, Amirudin Zul. (2011) Analisis Faktor-Faktor yang memprngaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Depok
- Kadek Aris Dwi Pratama. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *E- Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Akuntansi program S1*. Vol.3.
- Lasward, F. Fisher, R dan Oyelere, P.2005. Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Juornal of Accounting and Public Police*.

- Lestiani, A. 2008 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok*
- Lulus Kurniasih. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Nandhya Marfiana,. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
- Nur Lailatul Khasanah. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Kota / Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014). *E-Procceding Of Management. Vol.3.*
- Patrick, Patricia A. (2007). The Determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 In Pennsylvania local goverment. *Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – University, Pennsylvania (Retrieved August 8, 2001, from Accounting & Tax Periodicals, Publocation. No. AAT 3266180).*
- Putu Riesty Masdiantini. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E- Journal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.14.*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Setyowati, Lilis. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Daerah *jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.6 No.1*
- Setyaningrum (2012). Analisis Pengaruh Karaskteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan La[oran Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol.9 No.2*
- Shiddiq Nur Rahardjo. (2013). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia). *Dipenigoro journal Of Accounting. Vol.2.*
- Sinaga, Yuriska F dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pela[poran Keuangan di Internet secara Sukarela oleh pemda. *Skripsi FEB Universitas Diponegoro. Semarang*
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

www.google.co.id